

Pohon Kinerja

IKU-IK

2017-2022



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Sudirman 70, Komplek Perkantoran Marabahan (70513) ☎ (0511) 4799050

KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO KUALA **NOMOR 188/19/Inspektorat/2018**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

INSPEKTUR KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran strategis pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala maka perlu dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 3); dan
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

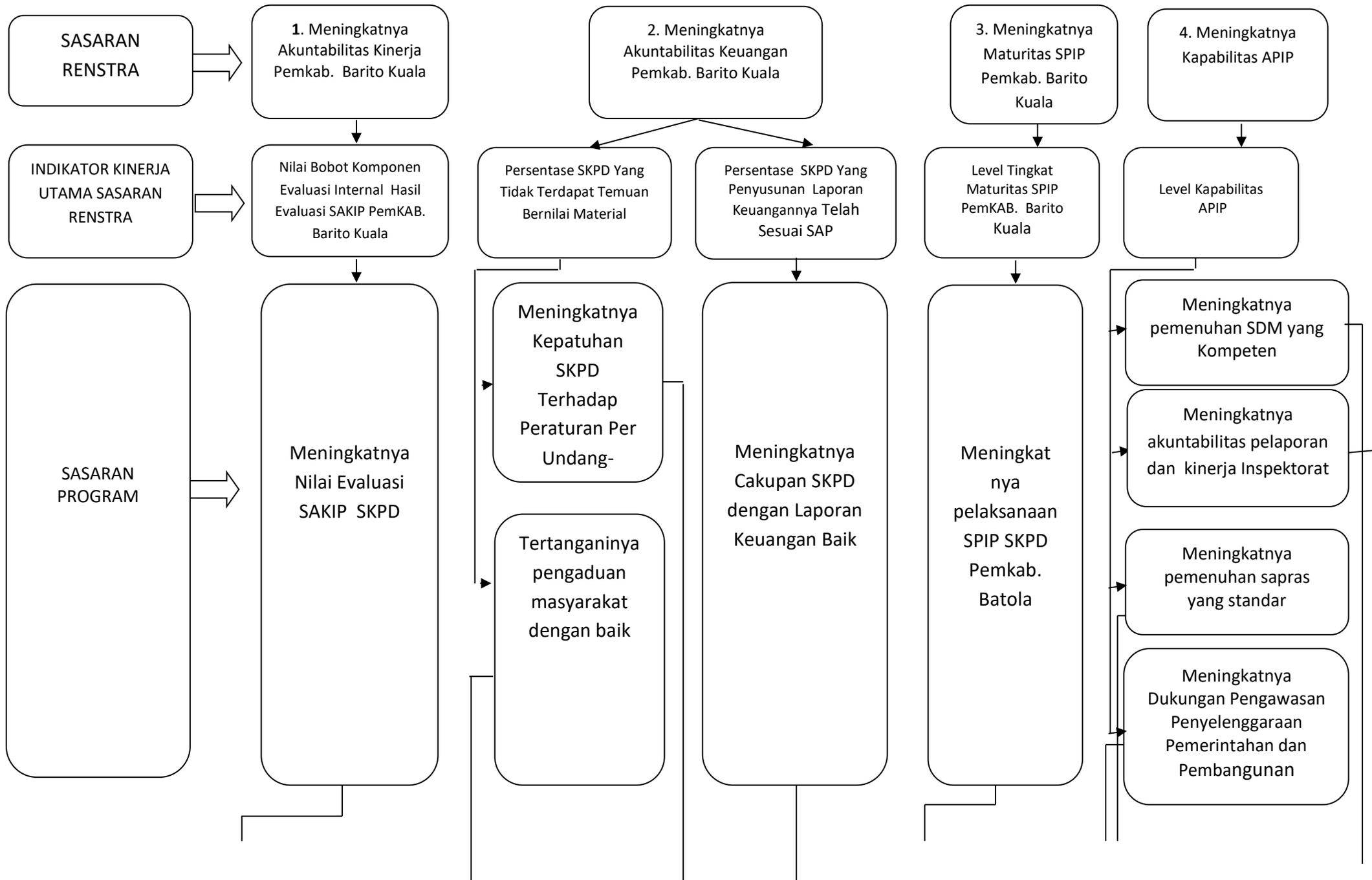
- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kinerja serta akuntabilitas kerja ASN pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

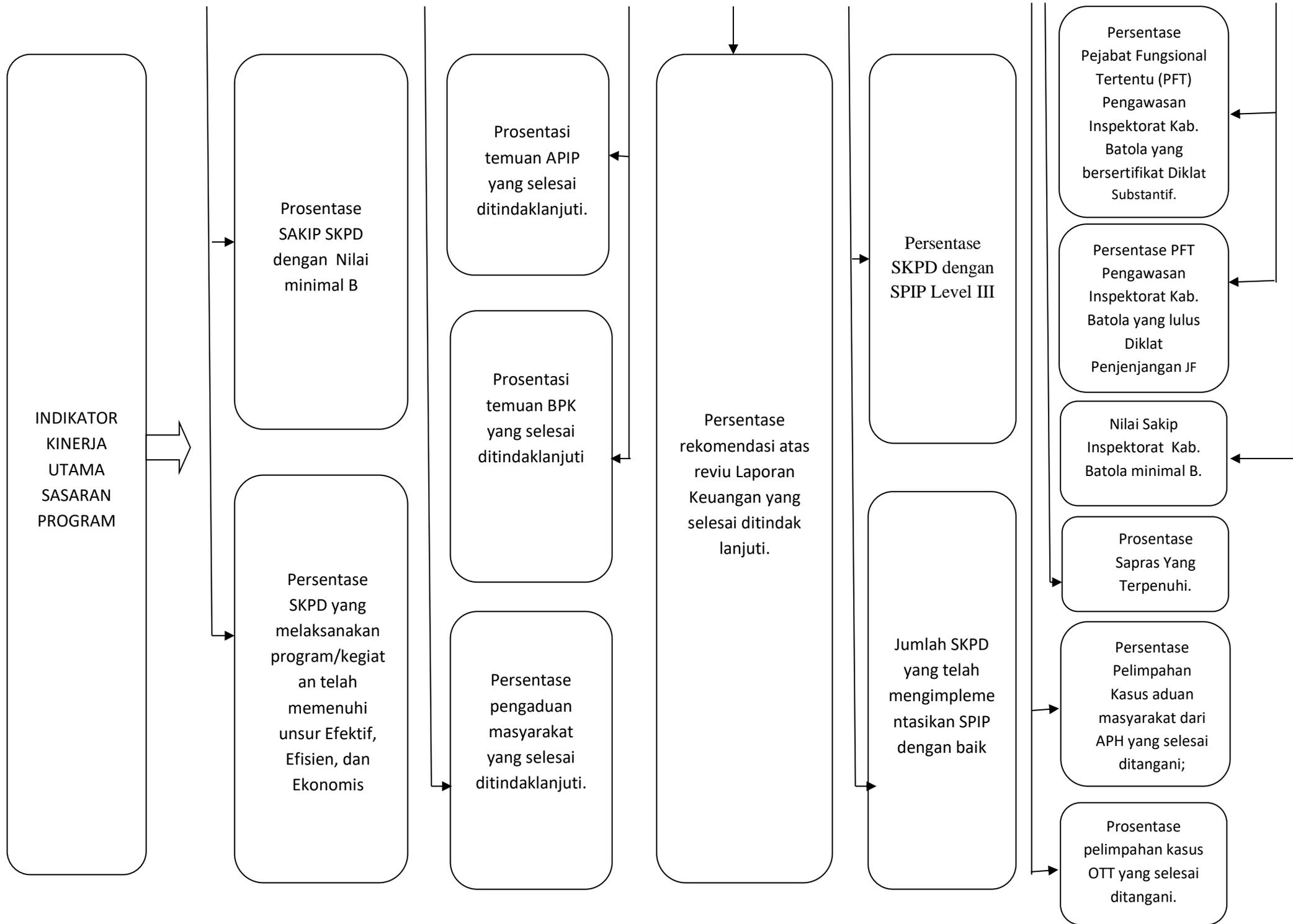
Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 30 Mei 2018

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 195812091991031002

POHON KINERJA (CASCADING) INSPEKTORAT
 KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN 2017 – 2022





Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan	Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan	Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan	Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan	Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan	Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan	Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan	Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan	Kinerja Utama Pejabat Eselon IV/PFT Pengawasan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Reviu RKA SKPD 2. Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola 3. Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD. 4. Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola 5. Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola. 6. Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 7. Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Audit Operasional 2. Melakukan Audit Manajemen Aset 3. Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran 4. Melakukan Probitiy Audit 5. Melakukan Monitoring TLHP APIP 6. Melakukan Monitoring TLHP BPK RI 7. Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. 8. Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola 2. Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola 2. Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan. 2. Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional. 3. Melaksanakan Pelatihan Dikantor Sendiri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun LAKIP Inspektorat Kab. Batola 2. Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola 3. Menyusun Laporan Inkhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Batola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP 2. Melakukan Pengadaan Sasana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tim Sinergitas Kabupaten Barito KUALA 2. Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus OTT pada Tim Saber Pungli Kabupaten Barito KUALA..

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHR RKA SKPD Sesuai Ketentuan; 2. Jumlah KKP Reviu RKA sesuai Ketentuan; 3. Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Ketentuan; 4. Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai Ketentuan; 5. Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai Ketentuan; 6. Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai Ketentuan; 7. Jumlah LHR RPJMD sesuai Ketentuan; 8. Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai Ketentuan; 9. Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai Ketentuan; 10. Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai Ketentuan; 11. Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 12. Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sesuai Ketentuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHA Operasional Sesuai ketentuan; 2. Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan; 3. Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan; 4. Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan; 5. Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan 6. Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan; 7. Jumlah Laporan Probity Audit sesuai ketentuan; 8. Jumlah KKP Probity Audit sesuai ketentuan; 9. Jumlah LHM TLHP APIP Sesuai ketentuan; 10. Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan; 11. Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan; 12. Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan; 2. Prosentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan; 2. Jumlah KKP LK Pemkab. Batola ; sesuai ketentuan; 3. Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan; 4. Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan; 2. Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan; 3. Jumlah Satgas SPIP SKPD Yang dibina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan 2. Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional 3. Prosentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan; 2. Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan; 3. Jumlah Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Barito Kuala sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SOP 2. Jumlah Laptop 3. Jumlah Printer 4. Jumlah Kendaraan Roda 4 5. Jumlah Kendaraan Roda 2 6. Jumlah Meja Kerja 7. Jumlah Kursi Kerja 8. Jumlah Lemari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat dari APH Selesai Ditindaklanjuti. 3. Prosentase OTT Yang Selesai Ditindaklanjuti.

<p>13. Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai Ketentuan;</p> <p>14. Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai Ketentuan</p>	<p>13. Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi;</p> <p>14. Persentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi.</p>					
---	---	--	--	--	--	--

Marabahan, 30 Mei 2018

Inspektur

Drs. Johan Arifin
NIP. 19581209 199103 1 002

Lampiran I. SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

JABATAN : Inspektur

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum khususnya perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh urusan bidang pemerintahan di daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU Kualitas Evaluasi SAKIP, dimaksud adalah memberikan jaminan kualitas terhadap pelaksanaan SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. ➢ Bahwa hingga tahun 2017, belum semua SKPD yang melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan, selain itu menjadi amanat Perda No 2 tahun 2018 tentang RPJMD, IKU Pemkab No 16 tentang Opini BPK. ➢ Formulasinya: Realisasi Perolehan Nilai Bobot yang Diberikan Oleh Evaluator dibagi Target Nilai Bobot Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola X 100 % ➢ Nilai Bobot Hasil Evaluasi atas LKIP Pemkab. Barito Kuala untuk unsur Evaluasi Intern yang diberikan oleh Instansi Berwenang (Kemen PAN-RB/BPKP/Itprop) selaku evaluator di bagi dengan Target Nilai Bobot. 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola dari instansi berwenang.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya Telah Sesuai SAP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU Laporan Keuangan sesuai SAP, dimaksud adalah memberikan jaminan bahwa kualitas Laporan Keuangan SKPD, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SAP, sehingga akuntabilitas laporan keuangan dapat diyakini keabsahannya. ➢ Hal ini menjadi amanah Perda RPJMD tahun 2017-2022, yang mendukung Opini BPK dan mempertahankan WTP. ➢ Formulasinya: Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP, dibagi semua SKPD X 100 % 	Inspektur Daerah	Laporan Keuangan SKPD lingkup Pemkab. Batola.

		Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IKU berkenaan dengan temuan bernilai material ini dimaksudkan, sebagai penjabaran atas Tupoksi Inspektorat, agar temuan yang bernilai material dapat diminimalisir. ➤ Bahwa hingga tahun 2017, masih ditemukan hasil pemeriksaan adanya penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP, kekurangan volume yang berdampak pada kerugian material. ➤ Formulasinya: Temuan pemeriksaan yang tidak bernilai material, dibagi dengan semua SKPD yang diperiksa X 100 %. 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI
3.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IKU ini memberikan korelasi terhadap pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 yang menekankan bahwa tahun 2019 semua Kabupaten Maturitas SPIP Level III. ➤ Dengan demikian Inspektorat selaku SKPD yang berwenang untuk mengawal upaya Tingkat Maturitas dimaksud menjadi sangat penting dan mendasar. ➤ Formulasinya: Nilai yang Diberi Oleh BPKP atas Evaluasi maturitas SPIP Pemkab. Batola di bagi dengan target yang ditetapkan dalam Renstra X 100 %. 	Inspsektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Pemkab. Batola dari BPKP.
4.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Level	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IKU ini menjadi bagian yang sangat penting, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas APIP, tuntutan kemajuan teknologi, dan dinamika perubahan yang cepat, sehingga Kapabilitas APIP harus ditingkatkan. ➤ Formulasinya: Jumlah APIP yang bersertifiktas Diklat Substantif dibagi jumlah semua APIP X 100 %. 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi atas Tingkat Kapabililas APIP Inspektorat Kab. Batola dari BPKP.

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran II. SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

JABATAN : Sekretaris

TUGAS : Membantu Inspektur melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

- FUNGSI :**
1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Inspektorat.
 2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat.
 3. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan dan kinerja Inspektorat	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inspektorat sebagai salah satu SKPD yang dituntut juga untuk meningkatkan nilai Sakip minimal B. ➤ Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan yang mendukung penilaian Sakip dimaksud. ➤ Formulasinya: Setiap unsur penilaian Sakip memperoleh nilai rata-rata B. 	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
2	Meningkatnya pemenuhan SDM yang Kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua PFT Pengawasan harus bersertifikat Diklat Substantif, secara bertahap sesuai perkembangan, dan penganggaran. ➤ Formulasinya: PFT yang bersertifikat Diklat Substantif dibagi jumlah semua pengawas X 100%. 	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenjangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta yang mengikuti Diklat PFT Pengawas semestinya lulus Diklat penjenjangan, dalam rangka peningkatan kompetensinya. ➤ Formulasinya: PFT yang lulus Diklat Penjenjangan dibagi dengan jumlah peserta yang mengikuti Diklat X 100 %. 	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

3	Meningkatnya pemenuhan sapras yang standar	Persentase Sapras yang Terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keberhasilan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan tidak terlepas dengan kegiatan penunjang, dalam hal ini terpenuhinya Sarpras yang memadai. ➤ Formulasinya: Sarparas yang memadai dan memenuhi standar dibagi semua sarpras yang tersedia/yang dibeli/disediakan X 100 %. 	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, keuangan dan Aset
4	Meningkatnya Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat dari APH yang selesai ditangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelimpahan kasus aduan menjadi tugas penting sebagai penjamin pelaksanaan pengawasan intern, yang harus ditangani, hal ini sebagai wujud koordinasi antara APH dan APIP. ➤ Formulasinya: Pelimpahan aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang diterima X 100 %. 	Sekretaris	APH
		Persentase pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasus pelimpahan OTT yang selesai ditangani menjadi salah satu indikasi kinerja APIP, dan menjadi tanggung jawab pengendali intern. ➤ Formulasinya: Pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani dibagi jumlah pelimpahan yang masuk X 100 %. 	Sekretaris	APH

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran III. SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

JABATAN : Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

TUGAS : Membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

FUNGSI :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu sesuai ketentuan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase SAKIP SKPD dengan Nilai minimal B	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja SAKIP SKPD ini, dimaksud adalah membantu Inspektur untuk jaminan terhadap upaya meningkatkan penilaian pelaksanaan SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. ➤ Belum SKPD yang melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan dan belum sempurna sehingga secara bertahap untuk meningkatkan nilai setiap unsur menjadi penting, nilai B adalah capaian moderat, yang hendak dicapai. ➤ Formulasinya: Jumlah SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP B, dibagi dengan semua SKPD yang dilakukan penilaian X 100 %. 	Urban I, II, III dan IV	Seluruh SKPD lingkup Pemkab. Batola.

		Persentase SKPD yang melaksanakan program/kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien, dan Ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Pelaksanaan Program ini, memberikan dukungan jaminan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD dapat diukur efektif, efisien dan ekonomisnya, sehingga setiap rupiah anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. ➤ Formulasinya: Jumlah program /kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan Rencana dan berhasil guna dibagi jumlah program/kegiatan yang direncanakan yang diaudit X 100 %. 	Urban I, II, III dan IV	SKPD yang Menjadi Objek Pemeriksaan
2	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Temuan APIP ini, merupakan tindak lanjut proses pemeriksaan yang dilaksanakan, sehingga temuan yang menjadi rekomendasi APIP dapat diperbaiki, diselesaikan, sehingga dampak dari kerugian, kesalahan, ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat diminimalisir. ➤ Formulasinya: Jumlah temuan APIP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah SKPD yang diperiksa X 100 %. 	Urban I, II, III dan IV	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Temuan BPK ini, merupakan perpanjangan tindak lanjut proses pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, sehingga temuan yang menjadi rekomendasi BPK dapat diperbaiki, menyelesaikan temuan, sehingga dampak dari kerugian, kesalahan, ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat diminimalisir. ➤ Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi BPK RI X 100 %. 	Urban I, II, III dan IV	Hasil Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP dengan BPK RI.
3	Meningkatnya Cakupan SKPD dengan laporan Keuangan baik	Jumlah rekomendasi atas revidi Laporan Keuangan yang selesai ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Rekomendasi ini, menjadi bagian penting untuk penyempurnaan laporan keuangan SKPD, sehingga dapat meminimalisir pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai ketentuan maupun berdampak kerugian keuangan Negara. ➤ Formulasinya: Jumlah rekomendasi Hasil Revidi LK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi Hasil Revidi LK X 100 %. 	Urban I, II, III dan IV	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
4	Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Pengaduan ini memberikan jaminan bahwa pemerintah sangat pro-aktif terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang patut ditindaklanjuti, sebagai bukti peran masyarakat dalam pembangunan. ➤ Formulasinya: Jumlah pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti dibagi semua jumlah pengaduan yang diterima X 100 %. 	Urban I, II, III dan IV	Sekretaris
5	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja SPIP ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan SKPD dalam menerapkan SPIP disemua jenjang, ➤ Formulasinya: SKPD dengan SPIP Level III dibagi semua SKPD X 100 %. 	Urban I, II, III dan IV	Urban I, II, III dan IV.

		Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IKU ini memberikan korelasi terhadap pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 yang menekankan bahwa tahun 2019 semua Kabupaten Maturitas SPIP Level III. ➤ Dengan demikian Inspektorat selaku SKPD yang berwenang untuk mengawal upaya Tingkat Maturitas dimaksud menjadi sangat penting dan mendasar. ➤ Formulasinya: SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik di bagi semua SKPD x 100 %. 	Urban I, II, III dan IV	Quetioner yang dibagikan kepada seluruh SKPD.
--	--	---	--	-------------------------	---

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran IV SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

JABATAN : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

TUGAS : Membantu Sekretaris menyiapkan bahan bidang perencanaan, keuangan dan aset, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi bidang perencanaan, keuangan dan aset.

FUNGSI :

1. Penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan;
2. Penataan kelembagaan;
3. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja;
4. Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
5. Penyusunan laporan keuangan
6. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyusun LAKIP Inspektorat Kab. Batola	Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	Lakip Inspektorat menjadi bagian dari keseluruhan Pemerintahan Kabupaten, Formulasi: Dokumen LAKIP yang disusun sesuai ketentuan, dibanding dengan Dokumen yang disusun dibanding dengan rencana yang disusun.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Kasubbag Evlap dan Pelaporan c. Bendahara Pengeluaran
2	Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	Laporan Keuangan Inspektorat , sebagai pertanggungjawaban semua lembaga, atas penggunaan anggaran. Formulasi: Jumlah laporan keuangan yang disusun dibanding dengan rencana dokumen yg disusun keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Bendahara Pengeluaran b. Pengelola/ Penyimpan Barang.

4	Menyusun SOP	Jumlah SOP	SOP adalah dokumen yang menjadi pelengkap untuk panduan pelaksanaan kegiatan. Formulasi: SOP yg disusun dibanding dengan rencana SOP yang disusun secara keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
5	Melakukan Pengadaan Sarana	Jumlah Laptop	Sarpras Laptop penunjang teknologi kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting, pengganti keterbatasan staf. Formulasi: Jumlah laptop yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan laptop keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Printer	Sarpras Printer penunjang kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah Printer yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan Printer keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Kendaraan Roda 4	Sarpras kendaraan Roda Empat sebagai penunjang operasional kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah Kendaraan Roda empat yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan Kendaraan Roda Empat keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Kendaraan Roda 2	Sarpras kendaraan Roda Dua penunjang operasional lapangan kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah kendaraan roda dua yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan kendaraan roda dua keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Jumlah Meja Kerja	Sarpras meja kerja kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah meja kerja yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan meja kerja keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

	Jumlah Kursi Kerja	Sarpras Kursi kerja kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting. Formulasi: Jumlah kursi kerja yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan kursi kerja keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban. I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan
	Jumlah Lemari	Sarpras Lemari arsip kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting, sebagai pengamanan dokumen. Formulasi: Jumlah lemari arsip yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan lemari arsip keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban. I, II, III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran V SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

- JABATAN** : **Kasub Bag Umum Kepegawaian**
- TUGAS** : Membantu Sekretaris menyiapkan bahan bidang umum dan kepegawaian serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi bidang umum dan kepegawaian.
- FUNGSI** : 1. Pelaksanaan Penatausahaan Surat Menyurat;
 2. Pengelolaan Perlengkapan kantor;
 3. Pengelolaan Ketatalaksanaan Perkantoran;
 4. Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 5. Pembinaan Sikap Perilaku dan Disiplin Pegawai;
 6. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 7. Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Setiap Pegawai;
 8. Pelayanan Pengelolaan Kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan, melalui Diklat Substansi. Formulasinya: peserta yang mengikuti Diklat dibanding dengan jumlah ASN keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian

2	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan melalui Diklat penjurangan. Formulasinya: peserta yang mengikuti Diklat Penjurangan dibanding dengan jumlah PFT keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
3	Melaksanakan Pelatihan Dikantor Sendiri	Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan melalui PDS. Formulasinya: peserta yang mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri dibanding dengan jumlah Pengawas keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
4	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus OTT pada Tim Saber Pungli Kabupaten Barito Kuala.	Persentase OTT Yang Selesai Ditindaklanjuti	OTT yang dilakukan oleh APH, dilimpahkan ke APIP, menjadi bagian tugas Inspektorat, hasil OTT yang ditindaklanjuti merupakan hasil kinerja pemberantasan Korupsi. Formulasinya: OTT yang selesai ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah OTT yang dilimpahkan X 100 %	Kasub Bag Umum Kepegawaian	APH

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran VI SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

- JABATAN** : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan.
TUGAS : Membantu Sekretaris menyiapkan bahan bidang evaluasi dan Pelaporan, serta melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi bidang evaluasi dan pelaporan.
FUNGSI : 1. Penyusunan rencana operasional pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan;
 2. Pelaksanaan operasionalisasi evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan melalui inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan di daerah;
 3. Penyiapan bahan administrasi laporan pengawasan, pengaduan-pengaduan masyarakat,
 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Melakukan Monitoring TLHP APIP	Jumlah LHM TLHP APIP Sesuai ketentuan	LHM TLHP APIP menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin percepatan penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD. Formulasinya: Realisasi LHM sesuai ketentuan dibanding dengan target LHM yang ditetapkan dalam PKPT.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
		Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan	KKP TLHP APIP menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin percepatan penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD. Formulasinya: Realisasi KKP TLHP sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP TLHP yang ditetapkan dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
2	Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi	Temuan APIP Penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga perlu mediasi oleh Inspektorat. Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai melalui mediasi dibanding dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai sebelum mediasi	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Rapat/Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan APIP.
3	Melakukan Monitoring TLHP BPK RI	Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan	LHM TLHP BPK RI dokumen penting untuk menjamin dalam upaya rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi LHM TLHP BPK RI yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHM TLHP BPK RI yang tercantum dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan

		Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan	KKP TLHP BPK RI dokumen penting untuk menjamin dalam upaya rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi KKP TLHP BPK RI yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP TLHP BPK RI yang tercantum dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
4	Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi	Temuan BPK RI Penyelesaian TLHP BPK RI antara SKPD dengan BPK RI, perlu Mediasi karena BPK tidak dapat menerima langsung dari SPKP yang bersangkutan, sehingga perlu mediasi oleh Inspektorat. Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai melalui dimediasi dibanding dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai sebelum mediasi.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Hasil Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP dengan BPK RI
5	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tim Sinergitas Kabupaten Barito KUALA	Persentase Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat dari APH Selesai Ditindaklanjuti	Pelimpahan Kasus pengaduan masyarakat dari APH yang dilimpahkan ke Inspektorat ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi Pelimpahan Kasus dari APH yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah pelimpahan kasus dari APH	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	APH
6	Menyusun Laporan Inkhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Barito Kuala sesuai ketentuan	Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat, menjadi bagian kinerja Inspektorat terhadap pengawasan intern lembaga. Formulasinya: Jumlah laporan ikhtisar pengawasan dibagi jumlah laporan yang direncanakan keseluruhannya.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran VII SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

- JABATAN** : Auditor.
TUGAS : Membantu Inspektur Melakukan Pengawasan Keuangan dan Kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
FUNGSI :
1. Pelaksanaan Audit Keuangan
 2. Pelaksanaan Audit Kinerja
 3. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
 4. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD
 5. Pelaksanaan Reviu RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
 6. Pelaksanaan Reviu Renstra SKPD
 7. Pelaksanaan Reviu RKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
 8. Pelaksanaan Reviu RKA SKPD
 9. Pelaksanaan Reviu LKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
 10. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP SKPD
 11. Pelaksanaan Evaluasi SPIP SKPD
 12. Pemeriksaan Pemeriksaan Khusus/Investigatif.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	LHR RKA SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Jumlah Realisasi LHR RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	KKP Reviu RKA menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP Reviu RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
2	Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Ketentuan	LHR LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.

		Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab.Batola sesuai ketentuan	KKP Reviu LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
3	Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan	LHR SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi LHR SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	KKP Evaluasi SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
4	Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola	Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan	LHR RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan kualitas Dokumen RPJMD. Formulasinya: Realisasi LHR RPJMD Pemda pada Bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan targer LHR RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan	KKP Reviu RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RPJMD untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RPJMD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Reviu RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
5	Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra SKPD untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi LHR Renstra pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR Renstra yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu Renstra SKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu Renstra SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
6	Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	LHR RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun, baik murni maupun perubahan Formulasinya: Realisasi LHR RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	KKP Reviu RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKPD yang tercantum dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

7	Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHP Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya kinerja SKPD untuk setiap tahun. Formulasinya: Realisasi LHA Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai ketentuan	KKP Audit Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya pelaksanaan Kinerja setiap tahun. Formulasinya: Realisasi KKA Audit Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding target KKA Audit Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
8	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Operasional dibanding dengan target LHA Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Operasional dibanding dengan target KKP Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
9	Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan	LHA Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target LHA Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan	KKP Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target KKP Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
10	Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	LHA Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	KKP Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
11	Melakukan Audit Probiti	Jumlah Laporan Probiti Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probiti menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Laporan Audit Probiti yang sesuai ketentuan dibanding dengan target Laporan Audit Probiti yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Probiti Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probiti menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Audit Probiti yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Audit Probiti yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

12	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHR LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
13	Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan	LHR LK SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
14	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	LHP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan LHP yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus/Kasus X 100 %	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Persentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan.	KKP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Realisasi Penerbitan KKP Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan KKP Khusus yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus X 100 %	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
15	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHE pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHE dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT	Auditor Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

16	Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD	Jumlah Satgas SPIP SKPD Yang dibina	Satgas SPIP SKPD yang dibina dibanding dengan SPIP SKPD keseluruhannya.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Laporan dari Irbn I, II, III dan IV.
----	---	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------------

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran VIII SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

- JABATAN** : Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
TUGAS : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan Keuangan.
FUNGSI : 1. Pelaksanaan Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan:
 a. Urusan Wajib
 b. Urusan Pilihan
 2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan:
 a. Pelaksanaan Pengawasan Administrasi Umum
 b. Pelaksanaan Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan
 c. Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 d. Pelaksanaan Pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 e. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 3. Evaluasi SPIP SKPD.
 4. Pemeriksaan Khusus/Investigatif

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	LHR RKA SKPD menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Jumlah Realisasi LHR RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	KKP Reviu RKA menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP Reviu RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD

2	Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHR LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	KKP Reviu LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
3	Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan	LHR SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi LHR SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	KKP Evaluasi SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
4	Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola	Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan	LHR RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan kualitas Dok. RPJMD. Formulasinya: Realisasi LHR RPJMD Pemda pada Bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan	KKP Reviu RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RPJMD untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RPJMD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Reviu RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
5	Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra SKPD untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi LHR Renstra pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR Renstra yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra untuk Lima tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu Renstra SKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu Renstra SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD

6	Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	LHR RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun, baik murni maupun perubahan. Formulasinya: Realisasi LHR RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	KKP Reviu RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun. Formulasinya: Realisasi KKP Reviu RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKPD yang tercantum dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
7	Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHP Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya kinerja SKPD untuk setiap tahun. Formulasinya: Realisasi LHA Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai ketentuan	KKP Audit Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya pelaksanaan Kinerja setiap tahun. Formulasinya: Realisasi KKA Audit Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding target KKA Audit Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
8	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Operasional dibanding dengan target LHA Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan	LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Operasional dibanding dengan target KKP Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
9	Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan	LHA Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target LHA Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan	KKP Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target KKP Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD

10	Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	LHA Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan taraget LHA Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	KKP Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan taraget KKP Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
11	Melakukan Probity Audit	Jumlah Laporan Probity Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probity menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Laporan Audit Probity yang sesuai ketentuan dibanding dengan target Laporan Audit Probity yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Probity Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probity menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Audit Probity yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Audit Probity yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
12	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHR LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
13	Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan	LHR LK SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD

14	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	LHP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan LHP yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus/Kasus X 100 %	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Persentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	KKP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Realisasi Penerbitan KKP Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan KKP Khusus yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus X 100 %	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
15	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implentasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHE pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen LHR dari masing-masing P2UPD
		Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implentasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	P2UPD Muda/Madya/ Pertama	Dokumen KKP dari masing-masing P2UPD
16	Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD	Jumlah Satgas SPIP SKPD Yang dibina	Satgas SPIP SKPD yang dibina dibanding dengan SPIP SKPD keseluruhannya.	P2UPD Muda/Madya.	Laporan dari Irbn I, II, III dan IV.

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002